



93 PEGAWAI TERLIBAT PUNGLI RP 6,1 M MENGUJI TAJI KPK 'BERBURU' DI LADANG SENDIRI

Dewan Pengawas KPK mengungkap ada pungutan liar terjadi di Rutan KPK sejak tahun 2021, jumlahnya mencapai lebih dari Rp 6 miliar. Sebanyak 93 karyawan KPK kini terseret kasus dugaan pungli. Sidang etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK pun sudah mulai digeber. Menyedihkan. Itulah kata yang diungkapkan berbagai pihak untuk menggambarkan kondisi komisi anti-rasuah saat ini. Indonesia Corruption Watch atau ICW menyebut hal ini sebagai tanda-tanda makin runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap keseriusan pemerintah memberantas korupsi. Bahkan Dewas KPK pun mengakui, ditemukan kongkalikong dan 'bisnis' jasa terselubung di antara para pegawai dan tahanan lembaga antirasuah itu dengan para koruptor. Padahal di sisi lain, KPK terus menggaungkan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas). Para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pun kompak menghadiri kegiatan di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (17/1/2024) malam.

Salah satu Capres yaitu Ganjar Pranowo mengatakan, dengan fakta ada pungli maka komisi KPK diminta harus terlebih dulu berburu di 'ladang' sendiri.

Baca di hal 11....

BEBERAPA GUNCANGAN BESAR DALAM

KPK SELAMA ERA FIRLI BAHURI, YAITU:

1. Lili Pintauli Disorot KPK Dugaan Gratifikasi

Eks Wakil Ketua KPK, Lili, diselidiki terkait dugaan menerima gratifikasi dari Pertamina terkait tiket MotoGP Mandalika dan menginap cuma-cuma di Lombok Tengah selama seminggu. Laporan masyarakat kepada Dewan Pengawas KPK memicu penyelidikan terhadap tindakan tidak beretika ini. Selama diusut, Lili melaporkan penerimaan tiket ke bagian Gratifikasi KPK untuk menghindari jerat pidana. Pemberian fasilitas gratis dari Pertamina, yang sedang berperkar dengan KPK, menciptakan konflik kepentingan. Lili telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai respons terhadap kontroversi ini.

2. Firlu Bahuri Menjadi Tersangka Pemerasan Syahrul Yasin Limpo

Ketua KPK, Firlu Bahuri, tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sejak 22 November 2023. Laporan muncul pada Agustus 2023 dan naik ke tahap penyidikan pada 8 Oktober 2023. Firlu dijerat dengan Pasal 12e, Pasal 12B, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Belum Tangkap Harun Masiku yang Menjadi Buron 4 Tahun

Harun Masiku diduga memberi suap untuk mengurus PAW anggota DPR Nazaruddin Kiemas, yang seharusnya diisi Riezky Aprilia menurut perhitungan KPU. PDIP memilih Harun, memberikan suap melalui eks Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan politikus PDIP Saeful Bahri. Meski KPK menggelar operasi tangkap tangan, Harun berhasil kabur, dan pada Agustus 2023, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengkonfirmasi bahwa Harun tidak berada di Indonesia.

4. Pungli di rutan KPK diduga dilakukan 93 pegawai KPK

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akan menyelenggarakan sidang etik terhadap 93 pegawai KPK yang diduga terlibat pungutan liar di Rutan KPK. Para pegawai tersebut dituduh menyalahgunakan wewenang dengan menerima uang untuk memberikan fasilitas kepada tahanan kasus korupsi. Dewas KPK telah memeriksa 169 orang terkait dugaan pelanggaran etik, dengan total transaksi keuangan mencapai Rp 6,1 miliar dari dugaan awal sekitar Rp 4 miliar.



**Government (Hal.2)
Polemik Kenaikan
Pajak Hiburan
40-75 Persen ;
Menteri Luhut
Tegas Ditunda**

Polemik Kenaikan Pajak Hiburan 40-75 Persen Menteri Luhut Tegaskan Ditunda

JAKARTA- Polemik kenaikan pajak hiburan ke 40-75 persen akhirnya menemukan titik terang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan 'turun gunung' dan menegaskan penundaan.

"Jadi, kita mau tunda saja itu dulu pelaksanaannya. Itu kan dari Komisi XI, bukan dari pemerintah ujung-ujug terus jadi gitu," tutur Luhut di akun Instagram pribadinya, Rabu (17/1/2024).

Hal ini dilakukan Luhut karena ia mendengar kegaduhan soal keberatan masyarakat saat berada di Bali beberapa waktu lalu. Setelah itu mendengarkan kegaduhan itu, ia langsung mengumpulkan instansi terkait untuk membahas kenaikan pajak hiburan tersebut.

"Sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi, dan kemudian judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Saya pikir itu harus kita pertimbangkan karena keberpihakan kita ke rakyat kecil sangat tinggi, karena itu banyak menyangkut pedagang-pedagang kecil juga," imbuhnya.

Kisruh pajak hiburan ini disebabkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Berbagai pelaku usaha di sektor hiburan memprotes beleid itu, mulai dari pengacara Hotman Paris Hutapea hingga penyanyi sekaligus pemilik bisnis karaoke Inul Daratista. Mereka merasa kenaikan tarif pajak itu bisa membunuh industri hiburan di tanah air.

Maklum, pada UU HKPD, tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikerek jadi 40 persen-75 persen. Padahal, aturan sebelumnya, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak mencantumkan batas bawah pajak hiburan kelompok tersebut.

"Jadi, hiburan jangan hanya dilihat diskotek, bukan. Ini banyak sekali dampak pada yang lain, orang yang siapkan makanan, jualan, dan sebagainya. Saya kira saya sangat pro dengan itu (kajian ulang UU HKPD) dan saya tidak melihat ada alasan untuk kita menaikkan pajak (hiburan)," tutup Luhut.

Terpisah, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengatakan kenaikan pajak hiburan jenis diskotek, karaoke, dan sebagainya menjadi 40-75 persen pada saat ini bukan momentum yang tepat.

"Kalau kita lihat momentumnya saat ini adalah momentum yang kurang tepat menaikkan pajak hiburan yang boleh dikatakan sangat-sangat besar di kisaran 40-75 persen," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang.



Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan

Dia menjelaskan, sektor pariwisata, khususnya hiburan, terkena dampak Covid-19 selama sekitar 2,5 tahun, sehingga usaha di bidang tersebut tutup atau terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sedangkan proses pemulihan, menurut Sarman, baru berjalan hampir 1 tahun. "Artinya, cash flow dari para pelaku usaha di sektor hiburan ini masih belum pulih, masih butuh mungkin 2-3 tahun ke depan."

Dengan adanya kenaikan pajak hiburan, kata dia, tentu akan memukul pengusaha di bidang hiburan. Sebab, para pelanggan akan berpikir dua kali untuk mengunjungi tempat usaha hiburan. "Itu akan mengurangi pengunjung, akan mengurangi konsumen mereka. Artinya, praktis akan mengurangi perputaran dan omzet mereka," beber Sarman.

Jadi, ujar dia, ada kekhawatiran jika misal jumlah pengunjung semakin menurun, tentu profit pelaku usaha akan menurun. Hal ini akan mengancam kelangsungan usaha mereka.

Ajukan Judicial Review

Terbaru, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga menyatakan akan mengajukan judicial review terkait ketetapan pajak hiburan yang kini memiliki kisaran 40-75 persen.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan Badan Pimpinan Pusat (BPP) PHRI Yuno Abeta Lahay mengatakan pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) ini, karena banyak tempat hiburan yang melekat pada hotel dan restoran.

"Kami sedang melakukan langkah hukum judicial review dan dalam waktu dekat diajukan meski beberapa daerah telah mengeluarkan perda, dan kemarin telah ada diskusi dengan Kemenparekrraf, tapi ini kami rasa kurang tepat, harusnya dilibatkan juga Kemenkeu dan Kemendagri," kata Yuno, di Bandung, Jawa Barat (Jabar),

Rabu (17/1/2024).

Adapun isi judicial review tersebut, kata Yuno, berbeda dengan gugatan yang dilayangkan Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI), dengan PHRI meminta pasal yang menetapkan besaran pajak 40 sampai 75 persen dihapuskan. "Karena pasal sebelumnya sudah ada yaitu 10 persen, jadi kami minta dikembalikan ke sana saja," ujarnya pula.

Yuno mengatakan dengan besaran tarif pajak minimal 40 persen dan maksimal 75 persen untuk hiburan khusus yang tergolong sebagai objek Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) itu, telah memunculkan kekhawatiran dari para pelaku usaha, termasuk di Jawa Barat, mengingat sektor hiburan merupakan penunjang pariwisata.

"Industri hiburan adalah kolaborasi. Hiburan dan kawan-kawannya itu kan penunjang pariwisata, kekhawatiran ini mulai terasa, Mbak Inul (Daratista) sudah menyampaikan kunjungan sudah dirasa turun. Kami memang dari seluruh stakeholder pariwisata menganggap ada satu bagian bahwa entertainment lifestyle di situ, terhambat dan itu otomatis mengganggu keseluruhan bisnis pariwisata," katanya pula.

Saat ini, kata dia lagi, di Jabar baru ada satu daerah yang sudah menetapkan tarif pajak hiburan 50 persen. "Sejauh ini yang saya tahu, Kabupaten Bogor sudah menetapkan 50 persen. Kami dari PHRI sudah mulai mengumpulkan data, cuma yang baru kami dapat itu Kabupaten Bogor ditetapkan 50 persen," katanya lagi.

PHRI juga, kata Yuno, memberikan dorongan pada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dalam Rakerda PHRI Jabar agar lebih peduli terhadap hal tersebut, meski pemerintah daerah memiliki keterbatasan karena mereka merupakan pelaksana undang-undang.

"Kami paham pemprov punya keterbatasan karena ini amanat undang-undang dan musti dieksekusi, jadi kami paham tapi saya yakin dengan mengutip ucapan Menteri Parekrf semalam bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan kami percaya akan hal itu," ujarnya.

Judicial review terkait pajak hiburan juga diajukan Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI), Mohammad Asyhadhi mengatakan munculnya aturan 40% pajak PBJT berpotensi mematikan usaha spa di seluruh Indonesia, karena harga jasa spa otomatis akan naik sehingga akan mengurangi minat masyarakat melakukan terapi kesehatan.

"Memasukkan usaha jasa pelayanan bisnis SPA sebagai bagian dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 adalah tidak tepat," kata Asyhadhi. (wid,ant,ist/dya)

BESARAN TARIF PAJAK HIBURAN, BIOSKOP, MUSIK, PANTI PIJAT DI UU HKPD

TARIF PAJAK 40%-70% MAKSIMAL

- Diskotek
- Bar
- Karaoke
- Mandi uap/SPA
- Kelab malam

TARIF PAJAK 10% MAKSIMAL

- Pegelaran seni, tari, musik, dan busana
- Kontes Kecantikan
- Kontes Binaraga
- Pameran
- Pertunjukan Sirkus, Akrobat, sulap
- Bioskop dan sejenisnya
- Permainan Ketangkasan
- Pacuan Kuda dan Balapan Sepeda Motor
- Olahraga dan Kebugaran (Fitness)
- Rekreasi air ekologi, pendidikan, budaya, salju, permainan, pemancingan, argowisata dan kebun binatang
- Panti pijat dan pijat refleksi

BEBAS PAJAK

- Kegiatan layanan masyarakat
- Kesenian dan hiburan lainnya yang diatur Perda
- Promosi budaya tradisional

TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

Mahfud Md: DPR Tak Mau Bentuk Pansus

JAKARTA - Masa tugas Satgas TPPU Rp 349 triliun yang dibentuknya pada April 2023 sudah selesai. Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahfud Md menyampaikan penanganannya yang paling signifikan terjadi pada transaksi impor emas sebesar Rp 189 triliun.

Satgas juga telah menuntaskan analisa 300 surat laporan hasil analisis (LHA) yang sempat mangkrak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mahfud MD, menerangkan bahwa 300 surat LHA dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp349 triliun itu benar. Menurutnya, telah dilakukan tindak lanjut pendalaman oleh Kejaksaan Agung, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Bea Cukai.

"300 surat LHA, LHP, informasi sebelumnya sudah dibahas secara sistematis oleh Satgas TPPU dengan melibatkan 12 orang tim ahli yang terdiri dari akademisi dan para tokoh yang konsen dalam pemberantasan TPPU bersama Dirban Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK," tutur Mahfud dalam konferensi pers, Rabu (17/1/2024).

Sebelumnya, Mahfud Md mengaku sudah menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk panitia khusus (pansus). Namun saat itu DPR tidak mau, hanya saja menyerahkan kasus ini ke dirinya dan ke Kemenkeu agar membentuk satuan tugas (Satgas). Maka dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) TPPU saat itu yang memiliki masa kerja hingga pada Desember 2023.

"DPR aja bentuk pansus, biar terungkap siapa sih yang main, kenapa ini tidak jalan, tapi DPR tidak mau. DPR bilang serahkan pak Mahfud aja dan Menteri Keuangan bentuk Satgas. Satgas ini sudah dibentuk dan uang Rp 349 triliun terus dikejar dan kasusnya ada," kata Mahfud.

Dibeberkan Mahfud, dari hasil analisa tersebut, ada satu surat yang saat ini sudah naik ke tahap penyidikan. Kasus tersebut berkaitan dengan importasi emas dengan nilai Rp180 triliun oleh Grup SB."Sebelum



Menkopolkum sekaligus Ketua Komite Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud Md

ada Satgas TPPU, kasus ini tidak berjalan. Setelah dilakukan supervisi mulai diproses dengan mengungkap dugaan tindak pidana kepabeanan oleh penyidik Dirjen Bea Cukai dan dugaan tindak pidana perpajakan oleh Dirjen Pajak," ungkap Mahfud.

Disebutkan Mahfud, dalam kasus Grup SB, Dirjen Pajak masih melakukan pengumpulan alat bukti. Menurutnya, terdapat empat wajib pajak yang saat ini tengah didalami. "Empat wajib pajak dengan perkiraan pajak wajib bayar mencapai ratusan miliar," kata Mahfud.

Lebih lanjut Mahfud menjelaskan, untuk kasus lainnya masih terus ditindaklanjuti, namun beberapa di antaranya adalah Rafael Alun, Anin Prayitno, dan Gayus tambunan. Supervisi Satgas TPPU ini pun akan melakukan monitoring melalui kelompok kerja yang dibentuk. Terkait dengan Satgas TPPU, kata Mahfud, masa tugasnya telah selesai hingga Desember 2023. Dalam waktu yang tidak lama, ujar dia, akan dilakukan pembahasan untuk memperpanjang masa kerjanya.

Sementara ini, tim pelaksana komite nasional TPPU akan melanjutkan tugas kerja Satgas TPPU hingga akhirnya diputuskan apakah diperpanjang atau tidak. Sehingga tindak lanjut sisa surat

yang tengah dilakukan tetap terpantau.

Usulkan Perpanjangan Masa Kerja

Di sisi lain, Mahfud MD akan mengusulkan agar masa kerja Satgas TPPU bisa diperpanjang. "Masa tugas Satgas TPPU telah berakhir pada 31 Desember 2023, dan dalam kurun waktu delapan bulan, Satgas telah melakukan supervisi dan evaluasi penanganan 300 surat informasi dengan nilai agregat lebih dari Rp 349 triliun," ujar Mahfud.

"Dulu mandatnya, Satgas ini kan sampai Desember. Ini di dalam kesimpulan rapat ini, di dalam rapat tadi berakhir Desember. Tetapi, saya akan membawa ke rapat komite nasional lagi untuk diusulkan perpanjangan," ungkap dia.

Mahfud yang merupakan Ketua Komite TPPU menyatakan akan menggelar rapat komite dalam waktu dekat untuk membahas perpanjangan itu. Lebih lanjut, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga melaporkan kinerja Satgas TPPU. Yakni membahas secara sistematis 300 surat laporan hasil audit (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP). Pembahasan dilakukan bersama tim ahli yang melibatkan pihak terkait, yakni Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan, dan Kepolisian. (wid,rls,ist/dya)

TENTANG SATGAS TPPU

Berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 49 Tahun 2023.

Satgas TPPU dibentuk untuk melakukan supervisi dan evaluasi penanganan laporan hasil analisis, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang.

Pada Satgas TPPU, Polri tergabung dalam tim pelaksana dan telah melakukan upaya sbb:

- Melakukan supervisi dan evaluasi penanganan dan penyelesaian dugaan TPPU
- Memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan hambatan dalam penanganan dugaan TPPU;
- Melaporkan hasil supervisi dan evaluasi penanganan dan penyelesaian dugaan TPPU.

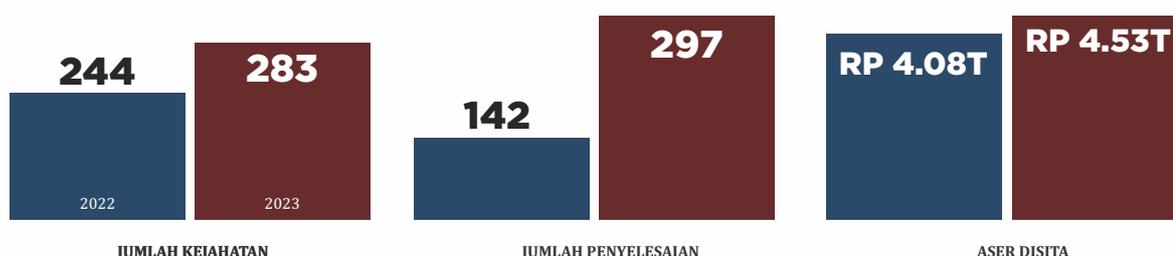
Pada tahun 2023, Polri menerima 24 Laporan Informasi terkait TPPU, Adapun perkembangannya hasil penanganannya sbb:

- 21 laporan selesai
- 2 laporan sedang ditangani Dittipideksus Bareskrim
- 1 laporan sedang ditangani Polda Jatim

Klasifikasi status penanganan laporan yang diselesaikan Polri: 11 perkara putusan pengadilan

- 5 perkara P21
- 5 perkara henti lidik

UNGKAP KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)



Sebanyak 33 Petugas KPPS di Kota Blitar Mundur

BLITAR - sebanyak 33 petugas KPPS yang bertugas dalam Pemilu 2024 di Kota Blitar, Jawa Timur, yang sudah terpilih memilih untuk mengundurkan diri. Hal itu diungkapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar.

Anggota KPU Kota Blitar Rangga Bisma Aditya mengemukakan KPU sudah melakukan proses seleksi dalam pemilihan KPPS tersebut dan memilih KPPS serta cadangannya. Dalam proses seleksi tersebut, dipilih 3.059 KPPS yang akan bertugas di TPS. Namun, ada 33 orang yang mengundurkan diri.

"Kami sudah lakukan seleksi di akhir Desember 2023 dan pengunduran diri itu di awal Januari 2024. Total ada 33 orang yang mengundurkan diri, bahkan ada satu TPS yang semua KPPS-nya mengundurkan diri," katanya di Kediri, Rabu (17/1/2024).

Ia menjelaskan, satu TPS yang KPPS-nya mengundurkan diri semuanya itu di TPS 13, Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Tim juga sudah melakukan investigasi penyebab KPPS di satu TPS mundur semuanya, yang ternyata terdapat intervensi.

Menurut dia, adanya intervensi itu sebenarnya tidak boleh. Hasil investigasi, ternyata mereka ditakut-takuti akan tugas berat yang harus diemban sehingga semuanya mengundurkan diri.



Anggota KPU Kota Blitar Rangga Bisma Aditya. ANTARA/Asmaul

Selain adanya intervensi, lanjut Rangga, alasan KPPS mengundurkan diri lainnya adalah karena bekerja. Saat mendaftar dimungkinkan mereka masih mengajukan lamaran pekerjaan, sehingga mendaftar menjadi KPPS. Namun, dalam prosesnya ternyata mereka lolos dan bersamaan diterima kerja, sehingga memutuskan mundur dari KPPS.

Selain itu, Rangga mengungkapkan bahwa melalui hasil investigasi, KPU menemukan bahwa ketujuh calon anggota KPPS di TPS 13 mundur bersama-sama karena merasa tidak mampu menjalankan tugas yang diberikan. "Alasannya cukup beragam. Namun ketika kami mendalami,

mereka menyatakan tidak sanggup melaksanakan tugas dengan baik," ujar Rangga.

Meskipun pengunduran diri tujuh calon anggota KPPS di satu TPS sempat menimbulkan perbincangan, Rangga menyatakan bahwa KPU telah mengambil langkah cepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Dua orang cadangan dan lima orang dari TPS terdekat segera diangkat untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan.

"Penting bagi kami untuk menjaga kelancaran proses pemilihan. Kami sudah menyiapkan langkah-langkah cadangan, dan saat ini TPS 13 Kelurahan Blitar sudah kembali

memiliki anggota KPPS yang siap melaksanakan tugas," tambah Rangga.

Selain kelompok yang mengundurkan diri bersama-sama, sejumlah calon anggota KPPS lainnya juga memutuskan untuk mundur dengan alasan diterima bekerja di luar kota. Meskipun demikian, KPU memastikan bahwa kebutuhan total anggota KPPS di Kota Blitar, sebanyak 3.059 orang, telah terpenuhi dan proses pemilihan di 437 TPS tetap berjalan tanpa hambatan.

"KPU telah mengisi kekosongan ini dengan calon baru sehingga kebutuhan anggota KPPS di Kota Blitar yang mencapai 3.059 orang telah terpenuhi. Kami pastikan proses pemilihan di 437 TPS di Kota Blitar tetap berjalan lancar," pungkas Rangga.

Sementara itu, terkait dengan sortir dan pelipatan surat suara di Kota Blitar, Rangga mengatakan saat ini masih proses sortir dan pelipatan surat suara. Dijadwalkan, pekan ini kegiatan itu selesai.

Setelahnya, KPU Kota Blitar akan melakukan proses seting serta pengemasan atau packing sesuai dengan kebutuhan per TPS. Nantinya disesuaikan dengan jumlah pemilih ditambah dengan 2 persen.

Di Kota Blitar, jumlah pemilih yang terdata adalah 119.087 orang pemilih. Aspirasi politik mereka akan disalurkan di 437 tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Blitar. (ant/lut/dya)

Pemkab Jombang Putus Kontrak Rekanan Proyek Sentra PKL di Jalan KH Dahlan

Suwignyo mengatakan, pemutusan kontrak dilakukan pada 12 Januari 2024 lalu. Sehingga, saat ini di lokasi proyek sentra PKL yang dananya bersumber dari APBD 2023 sebesar Rp 8,1 miliar, sudah tidak aktivitas pekerjaan lagi.

"Kami beri kesempatan penyelesaian sampai 12 Januari 2024 ternyata tetap tidak terselesaikan, akhirnya kami putus kontrak," tegas Suwignyo, yang juga

berstatus pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek ini, Kamis (17/1/2024).

Dijelaskan, pemutusan kontrak kerja sudah menjadi kesepakatan bersama usai pihaknya menggelar pertemuan dengan tim teknis pembangunan. Salah satu yang menjadi pertimbangan, adalah proyek itu tetap tak bisa selesai meski pemkab

sudah memberi kesempatan dengan tambahan waktu.

"Sudah tidak ada perkembangan yang mengarah ke penyelesaian. Sudah tidak mungkin lagi, perpanjangan 30 hari saja tidak selesai, apalagi misalnya ditambah lagi 20 hari. Padahal progres pengerjaan terakhir baru mencapai sekitar 67 persen," terang Suwignyo.

Itu sebab, lanjut Suwignyo, diputuskan pemkab mengakhiri hubungan kerja dengan rekanan proyek. "Penghitungan sementara progres antara 66-67 persen, tapi ini belum fixed karena akan dihitung lagi atau opname. Bisa jadi persentasenya malah lebih rendah dari itu," lanjut Suwignyo

Sampai saat ini, tak ada penjelasan dari rekanan ke pihaknya kendala terkait kendala dialami, yang mengakibatkan pengerjaan berjalan lambat dan amburadul. "Mereka tidak menyampaikan ke kami kendalanya apa. Cuma biasanya ini ada di permodalan, lalu manajemen pelaksanaan juga kurang bagus," kata Suwignyo.

Dari beberapa item pekerjaan dalam proyek itu, menurut Suwignyo, item paling banyak tak bisa tercapai adalah pemasangan paving. Saat ini lahan seluas 1,7 hektare hanya sebagian kecil titik yang sudah terpasang paving. "Juga item kelistrikan, pertamanan. Tapi paling banyak pemasangan paving," tutur dia.

Menurut dia, karena sudah diputus kontrak, sehingga rekanan proyek itu bakal diusulkan sanksi blacklist (daftar hitam). "Pelaksana kita usulkan di-blacklist karena wanprestasi," kata Suwignyo.

Proyek pembangunan sentra PKL di Jalan KH Ahmad Dahlan sendiri merupakan menjadi salah satu proyek strategis daerah pada 2023, dengan dana dari APBD 2023 sebesar Rp 8,1 miliar. Proyek itu dikerjakan PT Noval Indo Pratama. Sesuai kontrak harusnya pengerjaan selesai 14 Desember 2023, namun kemudian molor.

Pemkab memberikan tambahan waktu selama 30 hari atau hingga 12 Januari 2024. Namun, hingga tenggat waktu tiba, kontraktor gagal menuntaskan pekerjaan. (stn/lut)



Kondisi proyek sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan KH Ahmad Dahlan yang kini tanpa aktivitas pekerjaan dan terlihat amburadul. Banyak titik belum terpasang paving, Kamis (17/1/2024). (sutono/Lenteratoday)

JOMBANG - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Pemkab Jombang akhir memutuskan kontrak rekanan proyek pembangunan sentra pedagang kaki lima (PKL) di Jalan KH Ahmad Dahlan. Penyebabnya, pihak rekanan gagal menyelesaikan pekerjaan. Padahal sudah mendapat tambahan waktu selama 30 hari.

Kepala Disdagrin Jombang

Kasus Dugaan Korupsi Lima RTH DLH Kabupaten Madiun Jalan di Tempat

MADIUN - Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan lima Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun 2019 jalan di tempat. Hingga kini tim penyidik belum menetapkan tersangka pada proyek yang menelan anggaran Rp 2 miliar itu.

Kepala Kejari Kabupaten Madiun, Oktario Hartawan, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi dari tim ahli pidana, untuk dijadikan bahan ekspose di Kejati Jawa Timur. "Nanti hasil ekspose nya bagaimana, nanti kita laksanakan hasilnya," kata Oktario, Rabu (17/01/2024).

Menurut mantan Kajari Pidie Jaya Meureudu Aceh, tidak ada kendala dalam kasus RTH ini namun karena jadwal tim ahli pidana yang padat membuat kasus ini belum juga selesai. "Targetnya sesegera mungkin," ucapnya.

Dari informasi yang dihimpun di lapangan proyek pembangunan lima ruang terbuka hijau (RTH) pada yang



Kepala Kejari Kabupaten Madiun, Oktario Hartawan

dikerjakan pada tahun 2019 menelan anggaran APBD sekitar Rp 2 miliar. Kejari Kabupaten Madiun juga sudah menaikkan status perkara dugaan korupsi ke tingkat penyelidikan pada bulan September 2022.

Dalam pemeriksaan awal sesuai

dengan laporan yang diterima pihak penyidik ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan sehingga fisik proyek tidak sesuai spesifikasi pada 5 proyek yang masing-masing senilai Rp 400 juta.

Proyek RTH ini tersebar di

Kelurahan Mlilir, Kelurahan Nglames yang dikerjakan oleh CV Graha Kusuma, RTH Wungu yang dikerjakan oleh CV Zenita Jati, RTH di Kelurahan Munggut oleh CV Bangun Cipta Mandiri, dan RTH Kelurahan Pandean yang dikerjakan oleh CV Tirto Rejo Mulyo.

Sebelumnya, Tim Penyidik Kejari Kabupaten Madiun sudah memeriksa beberapa orang terkait kasus ini, diantaranya tiga orang dari konsultan perencana yaitu DA, HE dan OP. Ketiga konsultan tersebut bekerja dalam satu perusahaan bernama CV Niscala. Posisi DA sebagai direktoris, HE sebagai tenaga teknis dan OP selaku tim perusahaan tersebut.

Dalam tahap ini masih proses pendalaman. Kejari juga memanggil pihak yang terlibat dalam proyek senilai Rp 2 milyar itu. Termasuk pejabat DLH Kabupaten Madiun saat proyek berlangsung, pejabat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan pelaksana proyek di kelima RTH. (wit/lut)

Pemkot Surabaya Terapkan Tarif untuk Foto Komersial di Balai Pemuda

SURABAYA - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya memastikan kebijakan penerapan tarif foto dan video di Balai Pemuda hanya untuk kepentingan komersial, bukan masyarakat umum.

Kepala Disbudporapar Kota Surabaya, Hidayat Syah, mengatakan penerapan tarif komersial itu sesuai regulasi di Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. "Kami pastikan bahwa yang bayar itu hanya untuk kepentingan komersial, kalau hanya untuk pribadi gratis," kata Hidayat di Surabaya, Rabu (17/1/2024).

Hidayat merinci segala kegiatan yang dipatok biaya retribusi, seperti foto produk, iklan, sesi foto untuk kepentingan pernikahan yang dilakukan oleh vendor, dan pembuatan film maupun video klip, yakni sebesar Rp500 ribu per tiga jam.

Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah itu memang baru saja berlaku, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2024. Karena itu Disbudporapar Surabaya masih melaksanakan tahapan sosialisasi.

Sosialisasi tersebut salah satu

dengan menempelkan kertas pengumuman terkait peneanan tarif di Balai Pemuda.

Hidayat tak memungkiri bahwa penempelan kertas pengumuman soal aturan biaya taris untuk kebutuhan komersial menimbulkan pertentangan dari masyarakat. Karena itu, dia meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Kertas tersebut pun kini sudah dicabut oleh Disbudporapar Kota Surabaya.

"Jadi yang perlu diberikan garis bawah sekali lagi adalah hanya untuk yang kepentingan komersial," ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno menyatakan pencabutan kertas pengumuman tarif komersial di Balai Pemuda merupakan langkah yang tepat, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir di kalangan masyarakat. "Alhamdulillah sekarang sudah dicabut," ucapnya.

Anas meminta masyarakat tak perlu ragu memanfaatkan Balai Pemuda untuk kegiatan berswafoto maupun kegiatan lainnya, asalkan bukan dalam bentuk komersial. "Foto bersama teman atau keluarga tidak berlaku retribusi ini," tegasnya.



Balai Pemuda di Jalan Gubernur Suryo Kota Surabaya. ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Kota Surabaya sudah menolak adanya usulan penerapan retribusi untuk pengambilan foto maupun video untuk umum di Balai Pemuda.

Ketua Pansus Raperda Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Surabaya Anas Karno mengatakan Balai Pemuda yang terintegrasi dengan alun-alun, sekarang ini berkembang menjadi salah satu ikon wisata di kota

Surabaya.

"Hampir setiap hari, terutama menjelang libur atau saat hari libur, tempat itu banyak dikunjungi masyarakat," katanya.

Di tempat tersebut, lanjut dia, para pengunjung menikmati perpaduan suasana heritage dan moderen. Tidak hanya itu saja, tak jarang para pengunjung berswafoto, atau melakukan aktifitas fotografi profesional, misalnya prewedding. (ant/lut/dya)

Akuarium di Taman Adipura Kota Malang Disorot Warganet karena Konsep Berubah, DLH Sebut Inovasi Estetika

MALANG - Rencana awal Taman Adipura yang berlokasi di Jalan Semeru, Kecamatan Klojen Kota Malang, memiliki akuarium vertikal gagal terealisasi. Pasalnya, Pemkot memilih melakukan perubahan konsep. Kenapa?

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, mengatakan perubahan konsep tersebut berkaitan dengan unsur estetika dan improvisasi landscaping di Kota Malang. Diketahui, warganet pun sempat menyoroti perubahan itu.

Menurut Rahman, di awal DLH telah merencanakan konsep Akuarium Vertikal, dalam perencanaan kontrak Revitalisasi Taman Adipura yang dipercayakan kepada pihak penyedia. Namun, setelah serah terima dari pihak penyedia jasa kepada DLH Kota Malang, Rahman menilai bahwa hasil finalisasi taman tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga mendorong perubahan yang fokus pada aspek estetika, tanpa merubah struktur dasar.

"Jadi perubahan tampilan ini lebih ke arah estetika yang kita tuangkan sebagai bentuk improvisasi pada taman Adipura tersebut. Nah dari situ,

akhirnya kita berkoordinasi karena itu juga salah satu program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) oleh Kejaksaan, jadi kami sudah mengadakan rapat koordinasi lanjutan di masa pemeliharaan ini," ujar Rahman, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (17/1/2024).

Tak hanya itu, selain dengan PPS, Rahman menjelaskan bahwa perubahan konsep ini juga telah melibatkan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Menurutnya hal ini penting dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab DLH dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

"Kalau sebelumnya itu kan mungil dan tidak tampak, jadi ini dimensinya kita ubah sehingga secara karakteristik tidak lagi vertikal dan bisa disebut mega tank. Saat ini sudah selesai. Memang ini keluar dari kerangka kontrak tapi sudah sesuai dengan kesepakatan bersama. Pihak kedua selaku penyedia, juga kebetulan ekspektasinya sama dengan kita, jadi gak sesuai dengan perencanaan kontrak," ungkap Rahman.

Dalam menjawab berbagai tanggapan pro dan kontra dari warganet, Rahman menyampaikan

bahwa penilaian terhadap konsep ini, tergantung cara masyarakat dalam melihat keunikan dalam perubahan yang ada. Meskipun memahami adanya pro kontra, Rahman menganggap perubahan ini sebagai bagian dari inovasi untuk menjadikan landscaping Kota menjadi Malang lebih menarik.

Lebih lanjut, menyinggung aspek teknis seperti pemeliharaan dan kebersihan akuarium. Saat ini, menurut Rahman pihak penyedia juga masih bertanggung jawab dalam masa pemeliharaan sampai Mei 2024 mendatang. Setelah masa pemeliharaan selesai, menurutnya akan dilakukan Final Hand Over (FHO), yang mana aset tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada DLH dan dicatat sebagai penambahan aset di neraca organisasi.



Mega Tank, akuarium di tengah taman Adipura Kencana Kota Malang, Rabu (17/1/2024). (Santi/Lenteratoday)

"Kalau soal hal-hal teknis seperti pembersihan, memang itu kan masuk dalam kewajiban kami untuk merawat. Tapi kebetulan saat ini, masih ada di masa pemeliharaan yang dilakukan oleh penyedia PT Pangeran Muda. Karena sebetulnya konsep seperti ini sudah banyak di kota besar lainnya, mungkin di Malang masih belum familiar," tegas Rahman. (Santi/Dya)

Menyoal Teritorial Air Terjun Tumpak Sewu

Wabup Malang Harap Segera Ada Kesepahaman dengan Lumajang



Air Terjun Tumpak Sewu (Tangkapan layar Instagram Tumpaksewusemeruofficial)

MALANG - Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, mendorong tercapainya kesepahaman antara Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malang dan Lumajang, terkait teritorial Air Terjun Tumpak Sewu.

Dalam keterangannya, Didik menegaskan pentingnya menemukan solusi yang terbaik, meskipun wilayah tersebut berada di bawah kewenangan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Itu kan masuk di wilayah KLHK. Tentunya dalam hal ini, kan ini sebenarnya berebut pintu masuknya itu ada di teritorial daerah mana, Lumajang atau Kabupaten Malang, kan gitu. Tidak hanya itu saja, tetapi bagaimana dengan teritorial tanda batas, jadi kita sedang berupaya untuk duduk bareng," ujar Didik, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (17/1/2024).

Menurutnya, penting untuk menyelesaikan isu ini dengan meninggalkan ego

sektoral.

Terlebih dalam upaya mencapai kesepahaman terkait teritorial tersebut. Didik bahkan menyampaikan harapannya agar tempat yang berbatasan ini dapat dikelola secara bersama-sama.

Terkait hal tersebut, Didik juga mengaku bahwa selama ini pendapatan dari air terjun tersebut

masuk pada KLHK. Sementara Pemkab Malang hanya mendapatkan bagian retribusi. Meskipun demikian, Didik mengakui bahwa mencapai kesepahaman akan memberikan manfaat lebih besar untuk pengelolaan bersama dan keberlanjutan destinasi wisata tersebut.

"Tapi kan 2 Pemda ini masih agak alot, ego sektoral kita, lah. Maka ini harus dicarikan solusi yang terbaik. Artinya memang dari Provinsi nanti yang membuat keputusan. Syukur-syukur kalau nanti ada kesepahaman sehingga tempat yang berbatasan itu, yang selama ini memang menghasilkan, dikelola secara bersama. Itu kan lebih bagus," terangnya.

Lebih lanjut, Didik juga menyampaikan terkait preferensi akses pintu masuk dan kendala dari penentuan teritorial destinasi wisata tersebut. Menurutnya, warga lebih sering memilih lewat jalur Lumajang karena dianggap lebih aman dan nyaman. Maka dari itu, sambungannya, pembicaraan bersama perlu dilakukan, dan Bakorwil berkewajiban untuk mencari jalan tengah akan hal ini.

"Makanya ini yang harus duduk

bareng. Kita duduk bareng. Pengelolaan ini kan masih melibatkan Pokdarwis, tapi jika terus berlanjut seperti ini, perlu dipertimbangkan untuk menarik pengelolannya. Kerjasama antar daerah menjadi pilihan yang lebih baik, dengan harapan masing-masing daerah bersedia untuk saling berinvestasi," papar Didik.

Diakhir, Didik juga mengamati potensi ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, terutama menurutnya, saat ini Air Terjun Tumpak Sewu menjadi destinasi yang luar biasa dan tengah viral di media sosial. Didik berharap upaya bersama ini akan membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi kedua Pemda dan masyarakat sekitar.

Sebagai informasi, Air Terjun Tumpak Sewu berada di perbatasan antara Kabupaten Malang dan Lumajang, yang secara administratif, Air Terjun Tumpak Sewu berlokasi di Jalan Raya Sidorenggo, Sidomulyo, Pronojiwo, Lumajang. Namun, destinasi wisata ini juga dapat dinikmati dari rute Kabupaten Malang. Tepatnya melalui daerah Jagalan, Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading. (Santi/Dya)

NAMA BARU ANISHA ROSNAH SETELAH RESMI JADI ISTRI PANGERAN ABDUL MATEEN

ANISHA Rosnah sudah resmi menjadi istri Pangeran Abdul Mateen. Mereka pun telah melangsungkan upacara bersanding. Kedua mempelai baru saja melaksanakan tradisi adat dari pernikahan kerajaan yakni Perarakan Pengantin Diraja pada Minggu (14/1/2024).

Pangeran Mateen dan Anisha mengelilingi Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, sambil menyapa masyarakat yang menunggu debut penampilan pasangan ini setelah resmi menjadi suami istri.

Nama Anisha Rosnah pun telah berubah setelah menyandang status istri dari pewaris tahta Brunei Darussalam yang keenam.

Sebelumnya, nama lengkap Anisha Rosnah yakni Yang Mulia Dayang Anisha Rosnah binti Adam atau Anisha Isa-Kalebic, kini telah resmi berubah menjadi Pengiran Anak Isteri Anisha

Rosnah Bte Adam.

Anisha Rosnah merupakan anak dari pasangan Adam Kalebic dan Mariam Isa. Keluarga Anisha bukanlah keluarga sembarangan. Sang kakek merupakan salah satu orang terpandang di Brunei Darussalam. Anisha merupakan cucu penasihat sultan Brunei, yakni Pehin Dato Awang Isa Bin Awang Ibrahim.

Melansir berbagai sumber, sang kakek adalah seorang pendiri maskapai Royal Brunei Airlines dan telah menyandang gelar sebagai Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja.

Kakek Anisha pernah diangkat menjadi wakil jaksa agung pada 1968 dan menjadi wakil menteri besar pada 1970.

Bukan cuma itu, sang kakek kemudian diangkat menjadi Penasihat Umum Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mulai tahun 1971 hingga 2005.

Wanita 29 tahun itu merupakan lulusan dari salah satu universitas terkenal di Inggris yaitu University of Bath. Tak cuma itu, ternyata dirinya juga memiliki minat yang tinggi dalam bidang fashion dan travel.

Hal ini terlihat dari bisnis fashion miliknya yang bernama Silk Collective. Bisnis fashion tersebut menjual pakaian dan aksesoris.

Sementara itu, bisnis travel milik

Anisha Rosnah bernama Authentinerary. Jasa perjalanan ini menawarkan pengalaman perjalanan ke berbagai kota di Eropa.

Profil

Anisha Rosnah, biasa dipanggil Yang Mulia Dayang Anisha Rosnah binti Adam atau Anisha Isa-Kalebic. Anisha lahir pada tanggal 6 November 1994.

Anisha Rosnah merupakan keturunan bangsawan yang berpengaruh di Brunei. Anisha Rosnah binti Adam ialah cucu dari Pehin Dato Awang Isa bin Awang Ibrahim, yang saat ini menjabat sebagai penasihat khusus Sultan Brunei.

Mengutip laman resmi Kantor Perdana Menteri Brunei Darussalam, Pehin Dato Haji Isa pernah mengemban kedudukan sebagai Wakil Jaksa Agung pada 1968 dan Wakil Menteri Besar pada 1970 silam. Bahkan, ia juga pendiri maskapai Royal Brunei Airlines.

Anisha Rosnah memiliki tiga saudara kandung. Kakak kandungnya Danial Deen Isa-Kalebic yang merupakan sahabat Prince Mateen sejak kecil, dan dua adiknya yang bernama Idris Isa-Kalebic dan Marina Isa-Kalebic.

Melalui akun Instagramnya, kakak Anisha, Danial, pernah membagikan foto-foto kenangan yang

menunjukkan hubungan erat antara Anisha Rosnah dan Pangeran Mateen sejak mereka masih kecil.

Pada 7 Oktober 2023 lalu, pihak Kesultanan Brunei mengumumkan pernikahan Prince Abdul Mateen dengan Anisha Rosnah yang akan dilangsungkan pada Januari 2024.

Anisha Rosnah telah menjalin hubungan dengan Prince Mateen sejak tahun 2018 lalu. Namun, hubungan ini baru terpublikasi saat foto kebersamaan keduanya tersebar pada 2020 lalu.

Anisha Rosnah merupakan seorang pebisnis wanita. Anisha memiliki bisnis di bidang fashion bernama Silk Collective dan jasa travel untuk kota-kota di Eropa bernama Authentinerary (berbagai sumber)



PENYAKIT KULIT BERPOTENSI TIMBUL SAAT MUSIM HUJAN

DOKTER spesialis kulit dan kelamin Dr. dr. Fitria Agustina Sp.KK FINSVD FAADV menjelaskan sejumlah penyakit kulit, mulai dari kurap, panu hingga eksim yang berpotensi timbul saat musim hujan.

"Musim hujan identik dengan lembap, dengan banjir. Nah itu biasanya penyakit kulit yang berhubungan untuk kondisi tersebut misalnya penyakit yang disebabkan oleh jamur kulit," kata Fitria di Jakarta, Sabtu.

Dokter spesialis dermatologi dan venerologi lulusan Universitas Indonesia itu mencontohkan salah satu penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur kulit saat musim hujan adalah kandidosis kutis, yang biasanya dialami oleh orang bertubuh gemuk.

Kandidosis kutis, kata dia, umumnya muncul pada sela-sela jari kaki. Infeksi ini biasanya menyebabkan kulit di area tersebut menjadi basah atau kemerahan.

Selain itu, kondisi lembap pada musim hujan juga dapat menjadi penyebab berkembangnya penyakit jamur lainnya seperti tinea atau kurap.

Fitria menyebut bahwa kondisi lembap memungkinkan tinea yang bukan flora normal kulit untuk berkembang, terutama jika perlindungan kulit tidak optimal.

"Pada prinsipnya, kalau kayak tinea itu bukan flora normal ada di

kulit kita. Jadi dia tidak boleh ada di kulit kita. Tapi dia bisa berkembang biak kalau skin barrier kita tidak bagus, kalau kondisi kulit kita lembap itu akan berkembang biak dengan mudah," kata Fitria.

Fitria juga menyebutkan bahwa panu, yang disebabkan oleh jamur *Malassezia furfur*, adalah masalah kulit lainnya yang umum terjadi saat musim hujan.

Kelembapan yang tinggi, kurangnya kebersihan, dan pakaian yang sering basah dapat menjadi pemicu timbulnya panu pada beberapa individu.

"Kalau yang lainnya pada kondisi tertentu mungkin dermatitis atopik atau ekzema (eksim). Pada beberapa orang, kondisi hujan itu jadi pencetus untuk ekzema," kata dia.

Fitria menyarankan sejumlah tips agar terhindar dari masalah penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur saat musim hujan, mulai dari menjaga kebersihan kulit baik wajah maupun tubuh, menggunakan pelembab, dan tabir surya.

Terkait penggunaan tabir surya saat musim hujan, Fitria menegaskan bahwa hal tersebut tetap penting dilakukan karena cahaya tampak saat cuaca mendung atau berawan tetap mengandung sinar ultraviolet (UV).

"Cahaya tampak itu memang isinya selain ada UV-nya, ada juga blue light

atau sinar biru, atau infrared. Nah itu ada semua di cahaya tampak," kata Fitria.

"Untuk energi memang jauh lebih kecil dari UV, tetapi walaupun berawan UV tetap ada. Jangan hanya karena berawan tidak pakai sunscreen, walau agak gerimis tapi kan tetap terang," sambung dia.

Alergi dingin

Mengutip hloodoc, alergi dingin adalah reaksi kulit terhadap paparan dingin, baik dari air maupun udara. Ini termasuk paparan dingin dari cuaca dingin, berada di ruangan berpendingin udara (AC), atau setelah mandi di pagi hari.

Tingkat keparahan gejala di setiap orang berbeda-beda. Ada yang bereaksi ringan, dan ada yang bereaksi lebih berat.

Reaksi alergi dingin muncul saat adanya pelepasan histamin dan zat kimia lain dalam aliran darah yang dipicu oleh cuaca dingin.

Histamin adalah zat kimia yang diproduksi oleh sel-sel dalam tubuh saat mengalami reaksi alergi atau infeksi. Nah, jika kamu mengidap alergi dingin, beberapa faktor ini mungkin menjadi penyebabnya:

- **Faktor genetik (keturunan).** Sebuah studi yang dilakukan oleh

National Institute of Allergi and Infectious Disease (2012) menyebutkan, alergi dingin bisa disebabkan oleh faktor keturunan. Pada kasus ini, gejala biasanya timbul 30 menit setelah paparar suhu dingin dan bertahan hingga 48 jam.

- **Faktor usia.** Anak-anak dan remaja cenderung rentan mengidap alergi dingin. Namun, kondisi ini biasanya membaik seiring dengan pertumbuhan usianya.

- **Infeksi,** yaitu karena adanya infeksi yang dialami. Misalnya, infeksi pneumonia atau radang paru-paru yang membuat pengidapnya rentan mengalami alergi dingin.

- **Kondisi medis tertentu.** Misalnya, cacar air, hepatitis, leukimia kronis, sindrom Raynaud, hingga kanker.

Paparan suhu dingin bisa membuat sel darah putih melepaskan histamin ke aliran darah. Akibatnya, tubuh akan memberikan respons peradangan (inflamasi) dengan memunculkan ruam atau bentol merah yang terasa gatal, pembengkakan pada tangan, hingga perubahan kulit lain yang muncul sebagai reaksi alergi (Antarahalodoc)



"Pada prinsipnya, kalau kayak tinea itu bukan flora normal ada di kulit kita. Jadi dia tidak boleh ada di kulit kita. Tapi dia bisa berkembang biak kalau skin barrier kita tidak bagus, kalau kondisi kulit kita lembap itu akan berkembang biak dengan mudah,"

Dr. dr. Fitria Agustina Sp.KK FINSVD FAADV
Dokter spesialis kulit dan kelamin

HYUNDAI LUNCURKAN GAME MOBILITAS ROBLOX



HYUNDAI Motor Company, Senin, meluncurkan game bertema mobilitas masa depan di platform Roblox, bertujuan untuk melibatkan generasi muda dalam visi perusahaan tentang masa depan melalui pengalaman yang menyenangkan dan interaktif.

Sebelumnya, versi beta terbuka dari game tersebut ditampilkan sebagai bagian dari partisipasi Hyundai Motor dalam ajang Consumer Electronics Show (CES) 2024 di Las Vegas, Amerika Serikat, menurut rilis pers yang disiarkan di situs resmi Hyundai, Senin (15/1).

Melalui metaverse baru bernama "Hyundai Future Adventure", pengguna dapat menjelajah secara bebas dan berinteraksi dengan teknologi inovatif yang dikembangkan oleh Hyundai Motor.

"Hyundai Future Adventure" terdiri dari enam tantangan aksi-lompat yang bertema seputar

mobilitas masa depan yang akan memajukan peradaban manusia.

Pemain game Hyundai di Roblox bisa menjalani perjalanan mereka sambil menjelajahi taman bertema masa depan, yang menampilkan robotika, kendaraan listrik Ioniq, mobilitas udara canggih, teknologi hidrogen, dan teknologi masa depan lainnya.

Peta petualangan melibatkan kampus H-tech yakni area untuk menjelajahi teknologi mutakhir, taman air HTWO yang didukung oleh hidrogen, laboratorium robotika yang menampilkan berbagai robot Hyundai.

Pada game Roblox itu juga ada cakrawala pesawat luar angkasa yang menyoroti ekspedisi kosmik, taman botani yang mempromosikan nilai berkelanjutan yang diwujudkan oleh lini Ioniq, dan Antartika yang menampilkan robot penyelamat Hyundai.

Selain peta dan tantangan yang disediakan, Hyundai Motor juga menyediakan koleksi item dan aksesoris digital untuk pertama kalinya di lokapasar Roblox.

Pengguna bisa membeli dan menyesuaikan avatar mereka dengan karakter robot seperti Dal-e dan N Vision 74, serta item digital lainnya.

Hyundai Motor terus berinteraksi dengan generasi masa depan untuk mempromosikan visinya tentang mobilitas masa depan dan melibatkan kelompok-kelompok ini dalam inisiatifnya.

Sejak 2016, perusahaan telah mengadakan "Hyundai Kids Motorshow", sebuah kontes gambar yang terinspirasi dari imajinasi brilian anak-anak, berfokus pada konsep mobilitas masa depan.

Hyundai juga mengadakan "Future Mobility School", sebuah program pendidikan yang memberikan siswa kesempatan untuk mempelajari teknologi masa depan dan menjelajahi pilihan karier potensial melalui kegiatan kreatif.

Hyundai Motor berencana untuk meningkatkan komunikasinya untuk menekankan visi mobilitas masa depannya. Baru-baru ini, perusahaan memamerkan teknologi canggih di CES 2024, berfokus pada visi Hyundai untuk ekosistem energi hidrogen dan transformasi berbasis perangkat lunak.

Roblox merupakan game online gratis yang memungkinkan penggunaannya untuk mendesain permainan mereka sendiri dan memainkan kreasi dari pemain lainnya.

Permainan roblox menjadi fenomena sendiri untuk game mobile, sebab tak hanya digemari anak-anak, orang dewasa pun banyak yang

memainkan permainan ini.

Kini Roblox sudah memiliki lebih dari 150 juta pengguna aktif bulanan di berbagai negara.

Permainan roblox menyediakan banyak game gratis, sehingga pengguna bisa bermain sesuka mereka.

Konsep inilah yang membuat banyak orang tertarik dan tidak bosan memainkan roblox. Saat bermain, siapapun dapat menuangkan imajinasi untuk membuat bangunan bahkan game sendiri untuk dimainkan. (Antara-berbagai sumber)

ROBLOX DISUKAI ANAK-ANAK DAN DEWASA

1. BISA DIMAINKAN DI BANYAK PLATFORM

Game-game yang ada di ekosistem Roblox dapat Anda mainkan di hampir semua platform yang ada. Game ini juga dapat Anda download di perangkat iOS, Android, Xbox One, macOS, Windows, bahkan di perangkat virtual reality seperti Oculus Rift dan HTC Vive.

2. MUDAH DIMAINKAN

Roblox dapat dimainkan melalui aplikasi mobile, desktop, bahkan konsol game. Dalam permainan ini, pengguna bisa bermain sesuka mereka karena banyaknya game gratis yang tersedia. Oleh karena itu, tidak heran para pengguna tidak pernah bosan memainkan permainan dalam roblox.

3. BERBASIS KOMUNITAS

Roblox menyajikan berbagai macam permainan yang dapat dimainkan, baik RPG, FPS, serta balapan yang sering digemari anak-anak. Nah, jika anak Anda ingin membuat game buatan sendiri, ia dapat membangun dan mengkodekan dunia roblox dengan mekanika, objektif, serta karakter unik menggunakan roblox studio secara gratis. Dengan demikian, roblox menjadi salah satu platform kreatif yang cocok untuk mempelajari cara membuat permainan bersama teman-teman. Di roblox anak dapat berkomunikasi dengan teman melalui pesan dan bertemu melalui dunia virtual yang dipilih



MAKANAN PENYEBAB UTAMA KEMATIAN TERBANYAK MENURUT WHO

ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) telah memperingatkan agar tidak mengonsumsi garam berlebihan.

Ditulis laman Well and Good bAlasannya, karena garam bisa memberikan dampak buruk dari konsumsi garam terhadap kesehatan manusia.

WHO sebelumnya mengatakan dalam sebuah laporan bahwa dampak kesehatan utama yang terkait dengan diet tinggi natrium adalah peningkatan tekanan darah, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, kanker lambung, obesitas, osteoporosis, penyakit Meniere. penyakit, dan penyakit ginjal.

“Diperkirakan 1,89 juta kematian setiap tahunnya disebabkan oleh konsumsi terlalu banyak natrium,” kata WHO dilansir dari Timesofindia.

Natrium, salah satu komponen garam meja, berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan transmisi impuls saraf dalam tubuh.

Namun, asupan natrium yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke.

Mekanisme utamanya melibatkan retensi air. Kadar natrium yang tinggi mendorong tubuh menahan air untuk menyeimbangkan konsentrasi natrium dalam aliran darah.

Peningkatan volume darah yang bersirkulasi melalui pembuluh darah memberikan tekanan ekstra pada dinding arteri, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah.

Selain itu, air yang tertahan dapat menyebabkan perluasan dinding

pembuluh darah, menjadikannya kurang elastis dan lebih tahan, sehingga selanjutnya meningkatkan tekanan darah.

Kadar natrium yang tinggi dapat mempengaruhi fungsi sistem renin-angiotensin-aldosteron, yaitu sistem hormonal yang mengatur tekanan darah dan keseimbangan cairan.

Tekanan darah yang terus meningkat dapat merusak arteri, meningkatkan risiko aterosklerosis, dimana timbunan lemak menumpuk dan membatasi aliran darah. Hal ini pada gilirannya meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke.

Rekomendasi konsumsi garam per hari dari WHO

Untuk orang dewasa, WHO merekomendasikan asupan natrium kurang dari 2000 mg/hari (setara dengan kurang dari 5 g/hari garam (kurang dari satu sendok teh).

Untuk anak-anak berusia 2-15 tahun, WHO merekomendasikan penyesuaian dosis dewasa berdasarkan kebutuhan energi mereka.

Anjuran untuk anak ini tidak mencakup masa pemberian ASI eksklusif (0-6 bulan) atau pemberian makanan pendamping ASI dengan pemberian ASI lanjutan (6-24 bulan).5 gram garam mengandung 2000 mg natrium.

Untuk mengurangi asupan natrium, kurangi konsumsi garam karena mengandung natrium klorida dan makanan olahan yang mengandung natrium glutamat.

WHO merekomendasikan hal-hal berikut: kebanyakan mengonsumsi makanan segar dan sedikit makanan olahan; pilih produk rendah sodium (kurang dari 120mg/100g sodium); masak dengan sedikit atau tanpa tambahan natrium/garam; menggunakan bumbu dan rempah untuk membumbui makanan, bukan garam; membatasi penggunaan saus komersial, dressing, dan produk instan; batasi konsumsi makanan olahan dan singkirkan tempat/wadah garam dari meja.

Studi baru menemukan, bahwa menambahkan garam ekstra ke makanan, dapat meningkatkan risiko kematian dini. Sebab, makan terlalu banyak garam menyebabkan hipertensi atau darah tinggi, yang menjadi faktor risiko berbagai macam penyakit tidak menular.

Dalam studi yang dipublikasikan di European Heart Journal, peneliti



melibatkan lebih dari 500.000 orang.

Studi tersebut dipimpin oleh Profesor Lu Qi, dari Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine di New Orleans di Amerika Serikat, dengan rekan-rekan dari sekolah kedokteran Harvard.

Mereka menganalisis data dari 501.379 orang yang termasuk dalam studi Biobank di Inggris untuk penelitian tersebut sejak tahun 2006 hingga 2010.

Peserta penelitian diminta memilih jawab tidak pernah, jarang atau selalu menambahkan garam dalam makanannya. Kemudian melakukan pemantauan selama sembilan tahun terhadap peserta penelitian.

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi hasil juga diperhitungkan, seperti usia, jenis kelamin, ras, kekurangan, indeks massa tubuh (BMI), kebiasaan merokok, minum minuman beralkohol, aktivitas fisik, diet dan kondisi medis seperti diabetes, kanker serta penyakit jantung.

Hasilnya menunjukkan, mereka yang selalu menambahkan garam pada makanannya berisiko mengalami kematian dini hingga 28 persen, dibandingkan orang yang tidak pernah atau jarang melakukannya (berbagai sumber)



Menguji Taji ... (dari Hal 1)

KASUS pungutan liar (pungli) di rumah tahanan negara (rutan) cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap terdapat kongkalikong dan "bisnis" jasa terselubung di antara para pegawai dan tahanan lembaga antirasuah itu.

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris mengungkapkan modus pungutan liar (pungli) di rumah tahanan negara (rutan) KPK yang melibatkan 93 pegawai lembaga itu. Pungli itu, kata Syamsuddin, dilakukan para pegawai kepada sejumlah tahanan yang ingin mendapatkan fasilitas atau layanan yang seharusnya tidak diperbolehkan di dalam rutan.

"Pokoknya dengan melakukan pungutan kepada tahanan maka tahanan itu mendapat layanan lebih lah," kata Syamsuddin, Rabu (17/1/2024).

"Contohnya misalnya HP untuk komunikasi itu contohnya. Bisa juga dalam bentuk apa namanya nge-charger HP dan lain-lain," sambung Syamsuddin.

Padahal, dalam peraturan setiap tahanan dilarang membawa atau menyimpan alat komunikasi serta perangkat pendukungnya dalam bentuk apapun. Sebenarnya KPK sudah memberikan waktu kunjungan buat keluarga tahanan. Yakni setiap Senin dan Kamis. Selain itu, saluran komunikasi bisa dilakukan melalui kuasa hukum tahanan yang melakukan konsultasi.

Syamsuddin mengatakan, 93 pegawai yang diduga terlibat pungli di Rutan KPK termasuk kepala rutan, mantan kepala rutan, sampai staf pengawal tahanan. "93 (orang) itu ada kepala rutan, ada mantan kepala rutan, ada apa yang semacam komandan regunya yang gitu-gitu. Ada staf biasa pengawal tahanan. Macam-macam," ucap Syamsuddin.

Diberitakan sebelumnya, 93 pegawai KPK diduga terlibat pungutan liar pungli di Rutan. Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyebut pungli di Rutan KPK mencapai Rp 6,14 miliar.

Ini "Teman-teman menanyakan totalnya berapa? Saya tidak bisa menyatakan yang pasti, tetapi sekitar Rp 6,148 miliar sekian itu total kami di Dewas," kata Albertina dalam konferensi pers di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2024).

Lebih lanjut ia menyebut dari jumlah tersebut setiap orang yang terlibat menerima besaran yang bervariasi. Mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 504 juta. Ia pun mengungkapkan dalam kasus tersebut, pihaknya telah memeriksa 169 orang pegawai lembaga antirasuah. Hasilnya 93 orang di antaranya memenuhi syarat untuk berlanjut ke tahap sidang etik. "Paling sedikit itu menerima Rp 1 juta, dan yang paling banyak menerima Rp 504 juta sekian, itu yang paling banyak," ungkap Albertina.

Dewas KPK bakal menjerat mereka dengan pasal penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan dirinya sendiri sebagai-

mana Pasal 4 ayat 2 huruf b Perdewas Nomor 3 tahun 2021.

Para pegawai KPK itu menerima uang dengan jumlah yang berbeda-beda. Paling banyak hingga ratusan juta rupiah.

Integritas Dipertaruhkan

Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terlebih dulu berburu di ladang sendiri untuk memberantas korupsi. "Ini menyangkut integritas. Kalau KPK mau berburu untuk memberantas korupsi, ini salah satu ladangnya, pungli," kata Ganjar, di sela pertemuan dengan supir truk di Terminal Bus Kota Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (17/1/2024).

Menurut dia, pencegahan korupsi harus terus-menerus dilakukan, antara lain melalui pengawasan yang ketat. Jika tidak, KPK tidak dapat menjalankan fungsinya, dan akan selalu muncul kejadian serupa di kemudian hari. "Kalau ini tidak dilakukan, itu seperti namanya kapok lombok, makan cabe kepedesan. Ngomong tobat-tobat, tapi besok dicoba lagi, kumat lagi," ujar Ganjar.

Capres berambut putih itu, menyampaikannya skandal pungli yang melibatkan 93 pegawai, KPK harus direformasi agar kredibilitas KPK dapat ditegakkan kembali. Selain itu, transparansi juga harus terus dilakukan KPK, dan pengawasan dari masyarakat juga harus berjalan sebagai alat kontrol.

"Kalau tidak, KPK tidak bisa juga menjalankan fungsinya. Kejadian pungli di internal KPK itu, ya karena lemahnya pengawasan, ternyata nilai yang ada di dalam pun tidak seperti yang didengarkan. Ini yang mesti direformasi. Maka buat KPK kembalikan lagi kredibilitasnya, tapi semua harus ikut dalam pencegahan korupsi," tutur Ganjar.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem Taufik Basari (Tobas). Ia menilai temuan itu sangat menyedihkan sebab terjadi di dalam lembaga yang seharusnya dapat dipercaya masyarakat sebagai pemberantasan praktik kecurangan dan korupsi.

"Ini satu hal yang sangat menyedihkan ya, ketika pungli justru terjadi di dalam tugas yang menjadi tanggung jawab dari KPK," kata Tobas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Tobas pun meminta agar temuan itu dievaluasi total. Pertama, ia meminta agar penindakan hukum ditegakkan kepada para oknum yang terlibat. Kedua, KPK wajib mengevaluasi sistem yang berjalan saat ini.

Tobas menegaskan evaluasi harus dilakukan dari akar masalah. Menurutnya, bisa jadi praktik tersebut memang bukan sekali terjadi di KPK. Apabila evaluasi tidak segera dilakukan, Tobas meyakini tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK akan semakin jebol.

"Jadi peristiwa yang tidak dapat terkontrol ataukah sebenarnya ini sudah menjadi suatu hal yang biasa?"

yang berarti sudah bobrok sekali kalau ini menjadi suatu hal yang biasa," ujarnya.

Ketua KPK Singgung Jual Beli Jabatan

Sementara itu, tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menghadiri acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung Merah Putih KPK. Dalam kesempatan tersebut, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango, bicara soal kondisi pemberantasan korupsi saat ini.

Menurut Nawawi, saat ini di seluruh Indonesia masih marak ditemukan perilaku koruptif. "Di lapangan kami masih menemukan, di seluruh Indonesia maraknya praktik pemberian komisi atas proyek pembangunan, suap di perizinan, pengadaan barang dan jasa, bahkan sudah dimulai sejak perencanaan hingga jual-beli jabatan," kata Nawawi dalam pemaparannya di Gedung KPK, Rabu (17/1/2024).

"Kami temui oknum-oknum sebagai backing di sektor pengelolaan SDA seperti pada pertambangan, perkebunan, kehutanan," sambungnya.

Selain itu, Nawawi menyoroti soal masih banyaknya oknum-oknum yang memeras dan meminta jatah proyek di tengah masyarakat. "Dengan kata lain pemberantasan korupsi saat ini belum optimal pada masalah utama dan implementasi," ucapnya.

Atas dasar tersebut, kata Nawawi, KPK dibentuk dengan UU 30/2002 yang direvisi dengan UU 12/2019 untuk bekerja bersama aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. "Dari aspek penindakan secara spesifik dinyatakan bahwa sasaran KPK dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum," ucapnya. (wid,rls,ant,ist/dya)

JANJI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PARA PASLON



- Menekan tingkat korupsi melalui perbaikan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, yang membaik dari 34 (2022) ke 44-46 (2023);
- Memperkuat pencegahan korupsi melalui Sistem Integritas Nasional (SIN) yang melibatkan pemerintah dan swasta;
- Memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh sektor termasuk sektor-sektor strategis seperti SDA, alutsista, program sosial, infrastruktur, dan BUMN;
- Mengembalikan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen tidak tebang pilih dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain;
- Mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemiskinan yang nyata dan bertanggung jawab bagi pelaku korupsi;

- Memfasilitasi masyarakat sipil di bidang pemberantasan dan pencegahan korupsi, serta menempatkannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan negara yang bersih;
- Memasukkan budaya anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan nasional



- Memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.
- Menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
- Membuat bank tanah sebagai dasar kebijakan untuk meningkatkan kemanfaatan tanah, di antaranya dengan moratorium HGU dan HGB yang sudah habis masa berlakunya.
- Meninjau kembali peraturan tentang zona hunian tempat tinggal perkotaan sehingga tercipta pembangunan yang berkeadilan.
- Mencabut PP Nomor 78 Tahun 2016 dan menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak sebagai dasar penetapan upah minimum untuk meningkatkan daya beli pekerja.
- Menjamin untuk tidak mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi.
- Memperkuat program edukasi anti-korupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti-korupsi di sektor swasta dan publik.
- Memberikan prioritas pemberantasan korupsi pada sektor yang punya korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik, seperti pertanian, perdesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kebutuhan, SDA, dan perburuhan.
- Melakukan revitalisasi fungsi pengawasan melalui pembangunan inspektorat (independen dan akuntabel) dan pengawasan kebocoran penerimaan perpajakan yang dikombinasikan sistem transaksi keuangan yang bersifat bankable dan pembayaran non-tunai.
- Membangun pengendalian korupsi pada Sistem Logistik Nasional yang mengintegrasikan sektor perhubungan, perdagangan dengan pertanian, perikanan, kelautan dan pedesaan sehingga tidak saja mendorong ease of doing business, tetapi juga efisiensi pada biaya produksi.
- Melakukan revisi jaminan pensiun PP Nomor 45 Tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja.



- **Membasmi korupsi**
Mempercepat dukungan teknologi informasi dan penguatan KPK bersama dengan kejaksaan dan POLRI secara sinergis dan harmonis, serta mengamankan aset negara dari tangan koruptor.
- **Keadilan restoratif**
Mempercepat pengembangan dan penerapan alternatif pemidanaan dengan pendekatan seimbang antara korban dan pelaku melalui keadilan restoratif dan penerapan hukum sosial (kerja sosial, denda, serta bentuk sanksi hukum lainnya) atau jalur non-yudisial atas pelanggaran hukum ringan.
- **Aparat penegak hukum sejahtera dan profesional**
Meningkatkan kesejahteraan bagi aparat penegak hukum dan menyediakan insentif untuk peningkatan kinerja. Menyediakan saluran pengaduan yang aman dan terjamin untuk melaporkan perilaku penyalahgunaan kekuasaan.



DPRD SURABAYA HARAPKAN BLT UNTUK GAKIN TEPAT SASARAN

RENI ASTUTI: PERJUANGAN UNTUK MELINDUNGI WARGA MISKIN



Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti saat menemui dan berdiskusi warga. (dok)

SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti meminta agar penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) khusus warga miskin (gakin) di Kota Pahlawan ini tepat sasaran. Jangan ada satu pun warga gakin dengan KTP Surabaya terlewat bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tersebut.

"BLT khusus gakin Surabaya ini harus tepat sasaran. Tidak ada alasan apa pun warga gakin terlewatkan bantuan pengganti permakanan ini. Kami akan cek betul," ujar Reni Astuti, Rabu (17/01/2024).

Diketahui, mulai 2024 ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan BLT khusus untuk gakin Surabaya yang tidak masuk dalam data kemiskinan pemerintah pusat. Selama ini mereka adalah penerima bantuan program permakanan atau hantaran makanan jadi (rantang). Namun mulai Januari 2024, permakanan dialihkan ke BLT.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, BLT sebagai suatu bentuk perlindungan bagi warga miskin. Dia menegaskan pentingnya data kemiskinan yang terupdate dan faktual. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bila bantuan tersebut sampai kepada mereka yang membutuhkannya.

"BLT adalah program perlindungan. Mereka yang berhak atas

bantuan program tersebut harus terlindungi. Siapa yang berhak atas BLT ini? Ya mereka yang masuk data terupdate dan terfaktual," kata Reni Astuti.

Tekankan Pentingnya Peran RT/RW

Politisi yang juga calon anggota DPR RI di Pemilu 2024 tersebut menekankan pentingnya peran RT dan RW dalam memastikan keakuratan data kemiskinan. Dia memandang BLT untuk gakin ini seharusnya menjadi peluang bagi Pemkot Surabaya untuk memberikan bantuan kepada warganya yang belum terjangkau oleh bantuan pusat. Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial kepada mereka.

"Pak RT menjadi pemegang kunci utama. Warga tidak mampu tapi belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali harus dimasukkan sebagai penerima bulan berikutnya," tandas Reni Astuti.

Saat ini, total penerima BLT permakanan bulan Januari 2024 untuk warga Surabaya sebanyak 8.310 warga. Mereka adalah gakin, lansia, dan para disabilitas. Jumlah tersebut adalah data terupdate dari data primer triwulan keempat 2023.

Jumlah penerima terakhir 2023 jumlahnya 1.045 orang. Kemudian dilakukan update data dan cek faktual sehingga mendapatkan hasil dengan

jumlah penerima BLT mencapai 7.265 warga.

Para penerima manfaat tersebut adalah mereka yang tidak masuk dalam penerima program dari Kementerian Sosial (Kemensos) berupa Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Itu artinya, penerima BLT permakanan 2024 ini adalah yang tidak menerima bantuan PKH dan BPNT agar tidak penerima ganda. Kalau permakanan sebelumnya ditemukan ada penerima ganda, sehingga 2024 dialihkan permakanan menjadi BLT Surabaya. Meski demikian, Reni Astuti meminta agar data kemiskinan di Kota Surabaya ini terus terupdate secara faktual.

"Sekali lagi, peran RT dan RW di setiap kelurahan penting dalam memastikan data terkini dan terfaktual. Pak RW dan RT lah yang paham persis kondisi warganya," kata Reni.

Alumnus ITS ini menyebut bahwa pijakan utama adalah data kemiskinan. Akurasi data kemiskinan secara faktual bergantung RT RW setempat. Ada gakin usulkan. Kelurahan akan memastikan data kemiskinan sebelum diajukan ke Pemkot Surabaya sebagai penerima BLT.

Warga miskin di setiap wilayah hingga kampung akan terpotret nyata jika RT dan RW mendata secara faktual.

Warga sekitar pasti paham siapa yang berhak dan tidak berhak dimasukkan dalam data gakin sebagai penerima BLT. Selama akurasi data faktual, tidak akan ada lagi salah sasaran penerimaan BLT.

Lebih lanjut, Reni Astuti menggaris bawahi, bantuan tersebut adalah kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak warga miskin. Ia menekankan bahwa akurasi data kemiskinan harus menjadi pijakan utama, dan keterlibatan RT dan RW akan menjadi kunci untuk menghindari kesalahan sasaran penerima BLT.

"Kita semua melihat bahwa bantuan itu bukan permintaan warga. Tapi sejatinya bantuan itu adalah kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak warga gakin," pungkas Reni Astuti, mencerminkan kepedulian dan keberpihakan pada masyarakat miskin dalam upaya mendapatkan bantuan yang layak dan adil. "Perlindungan sosial tidak boleh ditunda terlalu lama," tutupnya. (ADV)



BLT adalah program perlindungan. Mereka yang berhak atas bantuan program tersebut harus terlindungi. Siapa yang berhak atas BLT ini? Ya mereka yang masuk data terupdate dan terfaktual,"



RENI ASTUTI

WAKIL KETUA DPRD SURABAYA